

## **KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**(Studi Terhadap Putusan Nomor 200/PDT.G/2020. PN Mdn)**

Oleh:

Ivan Abdiel Raissa

E1A019258

### **ABSTRAK**

Alat bukti dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 1866 KUHPerdara meliputi bukti tertulis, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara dimana akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian diantara para pihak saja. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai kekuatan pembuktian alat bukti surat berupa akta dibawah tangan dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan alat bukti surat sebagai alat bukti dalam membuktikan perbuatan melawan hukum serta akibat hukum dari dikabulkannya gugatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Analisis data dilakukan melalui studi kepustakaan dan pembahasan kasus-kasus hukum terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan alat bukti surat berupa akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor 200/PDT.G/2020/PN Mdn bergantung pada beberapa aspek, seperti keaslian, dan pengakuan tanda tangan dari para pihak yang membuatnya. Selain itu, faktor-faktor seperti perubahan keadaan, waktu, dan saksi-saksi lainnya juga turut memengaruhi kekuatan pembuktian alat bukti surat. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kekuatan pembuktian alat bukti surat dan akibat hukum dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Akta Dibawah Tangan, Gugatan, Pembuktian, Perbuatan Melawan Hukum.

# THE EVIDENTIARY POWER OF LETTER EVIDENCE IN UNLAWFUL ACT LAWSUITS

(STUDY OF DECISION NUMBER 200/PDT.G/2020. PN MDN)

By:

Ivan Abdiel Raissa

E1A019258

## ABSTRACT

Evidence in Article 164 HIR / Article 1866 KUHPerdata includes written evidence, witness evidence, evidence of suspicion, evidence of recognition, and evidence of oaths. A deed under the hand is a deed that is deliberately made for proof by the parties without the assistance of an official. The evidentiary power of a deed under the hand is regulated in Article 1875 of the Civil Code where the deed under the hand only has evidentiary power between the parties. Legal effect is the effect given by law on a legal event or action of a legal subject. This research discusses in depth the evidentiary power of letter evidence in the form of underhand deeds in the context of tort claims. This research aims to analyze the extent of the strength of letter evidence as evidence in proving unlawful acts and the factors that affect the strength of the evidence. The research method used is the normative juridical method with a statutory and case approach. Data analysis was conducted through literature study and discussion of related legal cases. The findings of this study indicate that the strength of letter evidence in the form of a deed under the hand as evidence in a tort lawsuit in Decision Number 200/PDT.G/2020/PN Mdn depends on several aspects, such as authenticity, and recognition of the signatures of the parties who made it. In addition, factors such as changes in circumstances, time, and other witnesses also influence the evidentiary power of letter evidence. Therefore, this research makes an important contribution in understanding the dynamics of the evidentiary power of letter evidence and legal consequences in the context of tort claims.

**Keywords:** Deed Underhand, Evidence, Lawsuit, Legal Cosequences, Unlawful Acts.